

**POLICY BRIEF**

**TATA KELOLA EKOLOGIS SUMATRA-  
ACEH DAN REORIENTASI KEBIJAKAN  
LINGKUNGAN**



# Tata Kelola Ekologis Sumatra-Aceh dan Reorientasi Kebijakan Lingkungan

Mohammad Basyuni<sup>1,2</sup>, Chusnul Arif<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup> Peneliti Berka Strategika

<sup>2</sup> Profesor Departemen Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara

<sup>3</sup> Profesor Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University



## Kelemahan Tata Kelola



Deforestasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai lebih dari 1,4 juta ha sejak 2016 hingga 2025 (WALHI, 2025)



631 perusahaan beroperasi di wilayah hulu hingga sempadan sungai mencakup tambang, perkebunan sawit, PBPH (Perhutanan Berbasis Perizinan Hutan), dan energi (WALHI, 2025)



Volume kayu hanyut menunjukkan indikasi pembalakan liar sistemik, bukan hanya pohon tumbang alami (Gubes Kehutanan IPB-Saharjo 2025)



Kerusakan hutan di hulu DAS menghilangkan fungsi alam dalam menyerap dan mengatur air, membuat limpasan meningkat, memicu longsor dan banjir bandang. (Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM- Suryatmojo, 2025)

## Dampak Banjir



**964**  
MENINGGAL



**264**  
HILANG



**894.101**  
MENGUNGSI

(Per 8/12/25, BNPB)



**1.666**

TITIK KERUSAKAN  
INFRASTRUKTUR

(PU, 2025)



**68,67 T**

KERUGIAN  
EKONOMI

(CELIOS, 2025)

## Sorotan Kunci Bencana

Banjir besar di Aceh-Sumatra menggambarkan kerentanan struktural DAS. Kerusakan ini dipicu oleh deforestasi, ekspansi industri ekstraktif, pembalakan liar, serta lemahnya pengawasan dan tata ruang. Kombinasi faktor tersebut membuat DAS kehilangan kemampuan regulatifnya, sehingga melampaui *tipping point* ekologi.

## Potret Singkat Banjir Sumatera 2025

Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November–Desember 2025 bukan sekadar bencana hidrometeorologis, tetapi merupakan akumulasi kerusakan ekologis, gagalnya tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan, dan dominasi paradigma pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Temuan empiris di wilayah terdampak memperlihatkan bahwa akumulasi gelondongan kayu, tingkat sedimentasi tinggi, perubahan pola aliran sungai, dan hilangnya tutupan hutan memperlihatkan bahwa fungsi ekologis Daerah Aliran Sungai (DAS) telah runtuh. Hal ini menegaskan bahwa intensitas dan skala kerusakan bukan saja anomali alam, tetapi konsekuensi sistemik dari kebijakan pembangunan berbasis eksploitasi. Meskipun dipicu hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar dan Koto, kerusakan parah terjadi karena hilangnya fungsi ekologis DAS (Suryatmojo, 2025).

## Dimensi Tata Kelola dan Regulasi

- Indikasi ketidaksesuaian tata kelola perizinan yang berpotensi tidak mempertimbangkan secara memadai daya dukung dan daya tampung sub-DAS.
- Kemungkinan lemahnya mekanisme pengawasan, termasuk kurang optimalnya audit ekologis dan verifikasi AMDAL di lapangan.
- Polemik mengenai penetapan status bencana nasional mengemuka karena hingga fase awal penanganan, belum ada keputusan resmi di tingkat pusat. Kondisi ini dinilai sejumlah pemangku kepentingan membuat koordinasi penanganan lintas-instansi berjalan tidak optimal.
- Fenomena "*policy captured by capital interest*" terlihat dari dominasi konsesi berbasis komoditas ekstraktif dan absennya restorasi ekologis jangka panjang.

## Paradigma Pembangunan Eksploitatif

Industrialisasi pertanian cenderung memandang alam dan sumber daya sebagai komoditas yang dapat dikuasai oleh individu atau korporasi, serta dikelola untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sering kali tanpa batasan ekologis yang memadai.

Pendekatan ini menciptakan kebijakan berorientasi kapital yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hanya bersifat eksploitatif terhadap sumberdaya alam, sehingga secara tidak langsung berkontribusi pada tekanan ekosistem dan ekologi serta meningkatkan risiko krisis iklim yang dipicu aktivitas manusia.

FAO (2015) mencatat bahwa lebih dari 33% tanah dunia mengalami degradasi sedang hingga berat akibat praktik pertanian tidak berkelanjutan.

Paradigma Pembangunan Eksploitatif ini harus dirubah menjadi Paradigma Tata Kelola Berkelanjutan (*Sustainable Governance Paradigm*) yang menegaskan bahwa sumber daya alam termasuk hutan merupakan anugerah dari Allah SWT, sementara manusia berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk memastikan kelestarian alam dan hutan secara berkelanjutan, bukan sebagai pihak yang hanya memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi dan pertumbuhannya hingga menimbulkan degradasi lingkungan dan *trigger* bencana alam.

Dalam paradigma ini, pemerintah berkewajiban mengelola sumber daya alam termasuk air, hutan, dan tambang (energi) sebagai milik rakyat yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak boleh dikuasai segelintir pihak tertentu pemilik modal apalagi pihak asing sesuai amanah UUD 1945. Pemanfaatannya harus tetap terikat pada prinsip keseimbangan ekosistem dan ekologis serta ke-maslahatan umum.



## Paradigma Tata Kelola Berkelanjutan: Intervensi Kebijakan Prioritas

### Tata Kelola Ekologis

#### Prioritas:

Stabilkan fungsi ekologis DAS

#### Fokus:

- Moratorium aktivitas ekstraktif di hulu DAS Sumatra dan Aceh.
- Penetapan DAS sebagai unit pengelolaan utama dalam semua rencana pembangunan daerah.
- Restorasi masif: gerakan reboisasi masif dan terstruktur terutama di daerah hulu yang terdegradasi.

### Penegakan Hukum dan Akuntabilitas

#### Prioritas:

Pastikan kejelasan tanggung jawab dan pemulihan

#### Fokus:

- Investigasi forensik spasial berbasis citra tutupan lahan (dengan peta konsesi dan izin) untuk menentukan tanggung jawab legal perusahaan yang terlibat dalam deforestasi.
- Penguatan pemerintah dalam memastikan skema ganti rugi dan pemulihan ekologis yang wajib dipenuhi oleh perusahaan terkait.

### Penguatan Etika Pembangunan Berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang Berkelanjutan

#### Prioritas:

Internalisasi nilai dalam perspektif pembangunan

#### Fokus:

- Evaluasi terhadap kebijakan yang mendorong eksploitasi berlebihan, dengan menggeser orientasi pembangunan kapitalistik menuju model yang lebih adil, ekologis, dan berkelanjutan
- Memperkuat tata kelola sumber daya melalui penegasan landasan etis syariah meliputi amanah publik, keseimbangan ekologis, dan kemaslahatan sebagai rujukan nilai untuk keadilan dan keberlanjutan

## Referensi

- CELIOS.2025. "Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera." Celios.co.id. Diakses 10 Desember 2025. <https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/>.
- CNBC Indonesia. 2025. "Dampak Bencana Banjir Sumatra: 1.666 Titik Infrastruktur Rusak Parah."CNBCIndonesia.com. Diakses 10 Desember 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251208185712-4-692239/dampak-bencana-banjir-sumatra-1666-titik-infrastruktur-rusak-parah>.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2015). Status of the World's Soil Resources: Main Report (Intergovernmental Technical Panel on Soils report). FAO. ISBN: 978-92-5-109004-6.
- Greeners. 2025. "Kayu Gelondongan Terbawa Banjir, Ahli IPB: Ada Pembalakan Liar." Greeners.co. Diakses 10 Desember 2025. <https://www.greeners.co/berita/kayu-gelondongan-terbawa-banjir-ahli-ipb-ada-pembalakan-liar/>.
- Liputan6. 2025. "Update Korban Banjir dan Longsor di Sumatera: 964 Orang Meninggal, 264 Hilang, 894.101 Mengungsi." Liputan6.com. Diakses 10 Desember 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/6232702/update-korban-banjir-dan-longsor-di-sumatera-964-orang-meninggal-264-hilang-894101-mengungsi>.
- Universitas Gadjah Mada (UGM). 2024. "Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS." UGM. Diakses 12 Desember 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>.
- WALHI. 2025. "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara serta Korporasi." WALHI.or.id. Diakses 10 Desember 2025. <https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-barat-aceh-dan-sumatera-utara-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi>.

## Profil Penulis



**Mohammad Basyuni** adalah Profesor pada Departemen Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Meraih gelar doktoral di Kagoshima University, Jepang, dan melanjutkan sebagai peneliti pascadoktoral dengan dukungan Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) di Center of Molecular Biosciences, Tropical Biosphere Research Center, University of the Ryukyus, Jepang, selama dua setengah tahun (2008-2010). Aktif sebagai *Lead Expert* Berka Strategika di bidang tata kelola kehutanan, konservasi dan ekosistem mangrove.

No. HP: 085325776785



**Chusnul Arif** adalah Profesor Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Ia menyelesaikan pendidikan formal tingkat sarjana dan master di Teknik Pertanian IPB University dan melanjutkan pendidikan doktoral di The University of Tokyo. Ia ahli di bidang teknik irigasi, kecerdasan buatan, pengelolaan sumber daya air, dan pengendalian lingkungan. Aktif sebagai *Lead Expert* Berka Strategika di bidang lingkungan dan pertanian berkelanjutan.

No. HP: 087770397307

KPP IPB Baranangsiang IV Blok  
A/35 Tanah Baru, Bogor Utara,  
Kota Bogor 16154

 +628131010404

 [info@berkastrategika.or.id](mailto:info@berkastrategika.or.id)

 [berkastrategika.or.id](http://berkastrategika.or.id)

 [berkastrategika](https://www.instagram.com/berkastrategika)